

Peningkatan Peran Pemerintah Desa untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa Masaingi

(Enhancing Village Government's Role in Alleviating Extreme Poverty in Masaingi Village)

Rudy Usman^{1*}, Andi Chairil Furqan², Muhammad Iqbal³, Nur Hikmah⁴, Hazel Nabil Ananta⁵, Saskia Islamay Faizal⁶

Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

rudyusman77@gmail.com^{1*}, acfurqan@gmail.com², anara.indi@gmail.com³,

nur590423@gmail.com⁴, hazelsmansa.sarjo@gmail.com⁵, saskiaislamay23@gmail.com⁶



Riwayat Artikel:

Diterima pada 28 November 2024

Revisi 1 pada 15 Januari 2025

Revisi 2 pada 21 Januari 2025

Revisi 3 pada 22 Januari 2025

Disetujui pada 22 Januari 2025

Abstract

Purpose: According to P3KE data, the number of households experiencing extreme poverty in Donggala Regency in 2023 reached 27,964 families. This data highlights the persistently high rate of extreme poverty in the region, including in Masaingi Village, which remains home to residents experiencing extreme poverty. Based on this, this community service activity aims to enhance the role and awareness of village government officials in efforts to alleviate extreme poverty in Siboang Village, Donggala.

Methodology: This activity employs an andragogical approach, emphasizing adult learning principles that focus on intrinsic motivation and self-directed learning. The program was conducted in Masaingi Village, Donggala Regency.

Results: Based on a review of the Masaingi Village Budget realization report, the village's expenditure has not complied with regulatory provisions. This activity seeks to motivate and raise awareness among Masaingi Village government officials about the importance of their role, particularly in optimizing the village fund budget to combat extreme poverty in their areas.

Conclusion: Strengthening officials' capacity and awareness is essential for regulatory compliance, effective budget management and targeted poverty alleviation. The sustainable reduction of extreme poverty requires proactive planning, transparency, and alignment of funds with community needs.

Limitations: The limitations of this study lie in its focus on a local scale, making its findings and recommendations potentially less generalizable to other regions with different characteristics. Additionally, the study relies on data available at the village level, which may be influenced by the quality and completeness of the reporting from relevant parties.

Contribution: This study offers a practical model for capacity building in rural governance, demonstrating how andragogy can enhance local government performance in poverty reduction.

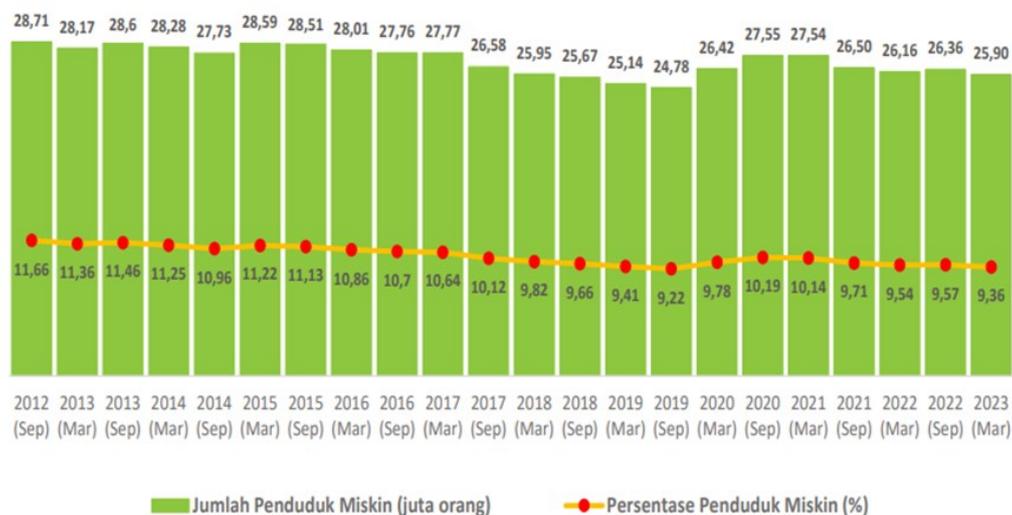
Keywords: *Extreme Poverty, Poverty Alleviation, Village Fund Expenditure.*

How to cite: Usman, R., Furqan, A. C., Iqbal, M., Hikmah, N., Ananta, H. N., Faizal, S. I. (2025). Peningkatan Peran Pemerintah Desa untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa Masaingi. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 1-10.

1. Pendahuluan

Kemiskinan ekstrem merupakan masalah yang masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan (Amofah & Agyare, 2022a). Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kategori pengeluaran perorang perhari sebesar RP 15.750 atau perbulan sebesar Rp 472.525 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 25,90 juta jiwa atau sebanyak 9,36 persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan periode Maret 2022 jumlah tersebut mengalami penurunan, namun dalam jumlah yang tidak signifikan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia periode Maret 2022 adalah sebesar 26,36 juta jiwa atau sebanyak 9,57 persen dari total jumlah penduduk. Selain kategori miskin berdasarkan jumlah pengeluaran perorang, BPS juga mengkategorikan kemiskinan ekstrem yakni pengeluaran perorang perhari dibawah Rp. 10.739 atau Rp. 322.170/orang/ bulan (Anindita, 2024). Kemiskinan ekstrim didefinisikan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang melampaui kekurangan pendapatan belaka untuk memasukkan kurangnya akses ke layanan dan sumber daya penting (Wahyudi, Fauzi, & Rizal, 2023). Penduduk dengan kemiskinan ekstrem ini merupakan bagian dari penduduk miskin karena mereka hidup dibawah garis kemiskinan nasional. Metode Cost Basic of Need (CBN) digunakan oleh BPS sebagai cara untuk mengukur tingkat kemiskinan (Castañeda et al., 2018). Metode ini dilakukan dengan cara memperhitungkan biaya pengeluaran konsumsi untuk makanan dengan kebutuhan gizi minimum setara dengan 2.100 kk per orang per hari (Haughton & Khandker, 2009), 2009). Pendekatan ini cocok digunakan dimana kemiskinan dinilai berdasarkan kemampuan untuk memenuhi standar hidup mendasar (Amofah & Agyare, 2022b).

Data pada gambar 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2023, tren penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia berjalan lambat. Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar 28,71 juta jiwa atau sebanyak 11,66 persen, apabila dibandingkan dengan data jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2023 hanya berkurang sebesar 2,81 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang bersifat kompleks yang perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah.



Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
September 2012- Maret 2023
Sumber : BPS (2024)

Mengacu pada data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), penduduk dengan kategori miskin ekstrem di Kabupaten Donggala pada Tahun 2024 adalah sebesar 39.895 keluarga (Kemenkopmk, 2024), dengan rincian sebagai berikut:

1. Desil I : 9.844 keluarga;
2. Desil II : 8.145 keluarga;
3. Desil III : 6.032 keluarga;
4. Desil IV : 15.874 keluarga.

Adapun dari segi individu, total individu yang berada pada tingkat kemiskinan ekstrem adalah sebanyak 167.488 orang, dengan rincian:

1. Desil I : 52.428 orang;
2. Desil II : 37.211 orang;
3. Desil III : 22.583 orang;
4. Desil IV : 55.266 orang.

Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah berupaya keras untuk mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan, namun realisasinya masih belum optimal di tingkat desa. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya kemampuan masyarakat miskin untuk menjangkau pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Hardana (2023) menekankan pentingnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai kunci pemberantasan kemiskinan. Selain itu, kurangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa juga memperparah situasi kemiskinan ekstrem ini. Peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal menjadi sangat krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan (Sinarwati, Putra, & Rona, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mempunyai kewenangan dalam mengurus dirinya sendirinya (W. H. Putri, Kresnanto, Raharti, & Andari, 2024). Pemerintah desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun, peran ini seringkali belum optimal akibat keterbatasan kapasitas, pengetahuan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Naltaru, 2014).

Salah satu desa yang penduduknya masih mengalami tingkat kemiskinan ekstrem adalah Desa Masaingi. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Masaingi, masih terdapat sekitar 150 keluarga yang tergolong kedalam kategori miskin ekstrem. Penyebab utama penduduk yang mengalami miskin ekstrem adalah karena terdampak dari bencana banjir besar yang menyebabkan mereka kehilangan lahan untuk mencari nafkah. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya pemerintah desa untuk merancang berbagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari status miskin ekstrem. Penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Masaingi sangat ditentukan oleh peran aparat pemerintah setempat, karena bagaimanapun juga pemerintahan desa menjadi fokus utama dan titik pusat peningkatan kesejahteraan penduduk (Dharma, Agustina, & Windah, 2021). Hal ini dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu langkah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan menjadi unsur utama yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Hal ini terkait dengan bagaimana pemberdayaan tersebut dilakukan agar berjalan selaras dengan harapan masyarakat (Hermanto, 2024).

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk mendukung pemerintah Desa Masaingi dalam memperkuat perannya dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah desa dapat lebih memahami permasalahan kemiskinan yang ada di wilayahnya, serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan solusi yang efektif. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, yang telah diberikan wewenang yang seluas-luasnya (Khomsin, 2023), melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemerintah desa diperlukan agar mereka lebih memahami dan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, pemerintah desa dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Selain itu, peningkatan peran pemerintah desa juga penting untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan dan dilaksanakan memiliki dampak yang nyata dan positif bagi masyarakat miskin (L. A. Putri, Wulan, Fihartini, Ambarwati, & Pandjaitan, 2022).

Pemerintah desa harus bisa mengelola dana desa semaksimal mungkin untuk mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa fokus penggunaan Dana Desa untuk tahun 2024 diutamakan penggunaannya untuk

mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan uraian di atas, maka tim pengabdian memandang penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik “Sosialisasi Peningkatan Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Desa Masaingi Kabupaten Donggala”.

2. Metodologi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dilanjutkan dengan pemantauan yang dilaksanakan selama 6 bulan, adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

2.1. Tahap Observasi

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, terlebih dahulu tim melakukan observasi di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Masaingi baik secara sosiologis, ekonomis maupun psikologis, agar kegiatan ini mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tahap ini dilakukan pada awal sebelum kegiatan pengabdian ini dilakukan, namun pada prosesnya dapat dilakukan kapanpun sejauh informasi di lapangan dibutuhkan. Pada tahap ini juga melibatkan mahasiswa sebagai Anggota Tim yang bertugas sebagai fasilitator dalam pengumpulan terkait semua informasi yang dibutuhkan.

2.2 Tahap Identifikasi Masalah

Pada tahap ini tim pengabdian mengidentifikasi masalah yang menjadi hambatan dan tantangan serta peluang untuk optimalisasi peran Pemerintah Desa Masaingi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam tahapan ini Ketua Tim dan Anggota serta seluruh mahasiswa yang dilibatkan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan. Pada tahap ini tim pengabdian melakukannya secara bersama-sama, dimana untuk pengamatan awal ditemukan permasalahan khususnya dari aspek pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah, motivasi masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan ekstrem juga dianggap masih rendah karena selama ini mengandalkan berbagai bantuan dari pemerintah seperti BLT.

2.3. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Pemantauan

Kegiatan PKM ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi, ini dilakukan untuk memberikan pemahaman, bekal pengetahuan dan peningkatan aparat Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan perannya baik sebagai regulator, dinamisator maupun fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem.

2.4 Tahap Evaluasi

Sebelum mengakhiri kegiatan pengabdian ini, pada tahap ini tim pengabdian memastikan bahwa kegiatan pendampingan telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan

2.5. Kepakaran Tim

Keterlibatan tim kegiatan pengabdian terdiri dari tiga orang dosen dan 2 orang mahasiswa. Personalialia Tim terangkum pada tabel berikut:

Tabel 1. Personalialia Tim dan Kepakaran

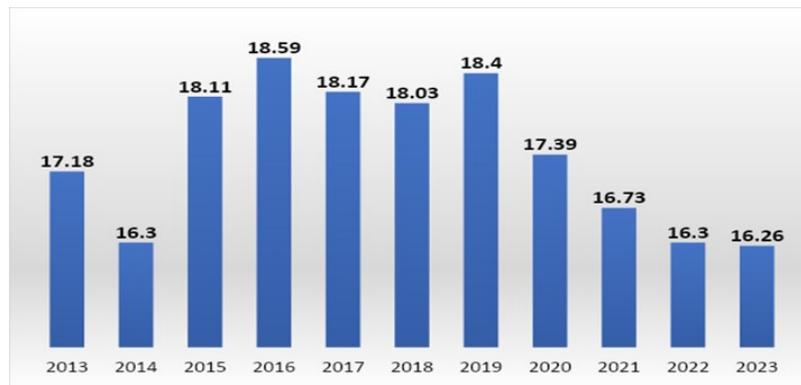
No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Jenis Kepakaran
1	Dr. Rudy Usman, SE.,MSA.,Ak.	Ketua	Akuntansi Sektor Publik
2	Dr. Andi Chairil Furqan, SE.,M.Sc.,Ak.	Anggota	Akuntansi Sektor Publik
3	Muhammad Iqbal, SE.,M.Si.,Ak.	Anggota	Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi
4	Nur Hikmah	Mahasiswa	Accounting Creator
5	Hazel Nabil Ananta	Mahasiswa	Accounting Creator
6	Saskia Islamay Faizal	Mahasiswa	Accounting Creator

Tabel 1 menjelaskan komposisi Tim Pengabdian yang terdiri dari tiga dosen dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako, serta melibatkan tiga mahasiswa. Para dosen memiliki keahlian di bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi keuangan, yang relevan dengan topik penelitian terkait analisis Laporan Keuangan Pemerintah Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dalam konteks pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Keterlibatan mahasiswa bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengalaman langsung, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Profil Kemiskinan Kabupaten Donggala

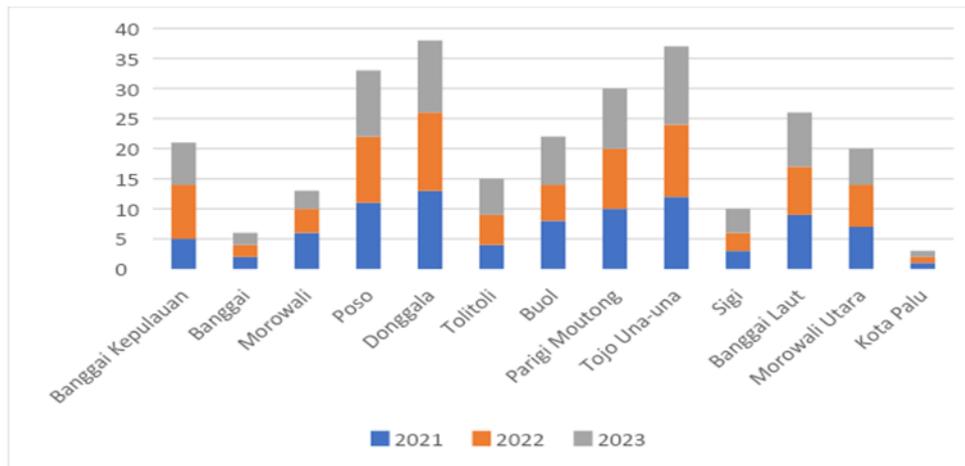
Kabupaten Donggala merupakan salah satu kabupaten dengan penduduk miskin terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak Tahun 2013 persentase masyarakat miskin di Kabupaten Donggala masih di atas rata-rata persentase penduduk miskin di seluruh Kabupaten di Sulawesi Tengah. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala Tahun 2013-2023
Sumber: BPS (2024)

Grafik diatas menggambarkan pertumbuhan kemiskinan di Kabupaten Donggala selama periode 2013 hingga 2023. Angka yang ditunjukkan dalam grafik ini adalah persentase tingkat kemiskinan tiap tahun. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan di Kabupaten Donggala tercatat sebesar 17,18%. Pada tahun 2014, angka ini mengalami penurunan menjadi 16,3%. Namun, pada tahun 2015, tingkat kemiskinan meningkat tajam menjadi 18,11% dan terus meningkat pada tahun 2016 mencapai puncaknya di 18,59%.

Setelah puncak tahun 2016, angka kemiskinan sedikit menurun pada tahun 2017 menjadi 18,17% dan tetap relatif tinggi pada tahun 2018 di angka 18,03%. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan kembali menjadi 18,4%, yang merupakan salah satu angka tertinggi dalam periode yang ditinjau. Namun, mulai tahun 2020, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan turun menjadi 17,39%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2021 menjadi 16,73%. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan tingkat kemiskinan mencapai 16,3%, dan sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 16,26%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Donggala dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Tengah tiga tahun terakhir masih menempati ranking tertinggi, bersamaan dengan Kabupaten Tojo Una-Una.



Gambar 3. Rangkang Persentasi Masyarakat Miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023
Sumber: BPS (2024)

Gambar 3 menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala dan Kabupate Tojo Una-Una yang merupakan daerah yang juga menerima alokasi dana desa yang signifikan, ternyata tidak berkorelasi dengan jumlah persentase penduduk miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa belum dapat memberikan kontribusi bagi penurunan persentase penduduk miskin. Pengalokasian dana desa dianggap belum optimal dalam memberi peran bagi masyarakat miskin khususnya untuk terlibat dalam aktivitas peningkatan perekonomian. Keterlibatan masyarakat atau komunitas dalam pembangunan wilayah pedesaan selain dapat meningkatkan partisipasi pembangunan juga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi melalui aktivitas bisnis dalam industri. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki potensi, agar dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan daerah.

3.2. Belanja Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Masaing

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengentaskan masalah kemiskinan di tingkat desa yaitu dengan memanfaatkan alokasi dana desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagai upaya maksimal pemerintah dalam mencapai target 0 (0) persen kemiskinan ekstrem pada Tahun 2024. Dalam Pasal 2 (1) Peraturan menteri tersebut, disebutkan bahwa fokus penggunaan Dana Desa untuk tahun 2024 diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

1. Pengentasan kemiskinan ekstrem yang diberikan dalam bentuk BLT Dana Desa (maks. 25% dari pagu Dana Desa);
2. Program yang terkait dengan ketahanan pangan dan hewani (min. 20% dari pagu Dana Desa);
3. Dana untuk operasional pemerintah Desa (maks. 3% dari pagu Dana Desa);
4. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan
5. Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendes No. 13 Tahun 2023 maka fokus utama pemerintah desa pada tahun ini adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dari pemerintah desa, yakni memaksimalkan pemberdayaan masyarakat yang masih mengalami kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka salah satu tahapan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan telaah atas realisasi belanja APBD Pemerintah Desa Masaing, untuk melihat apakah belanja desa telah direalisasikan sesuai arahan peraturan tersebut. Untuk itu berikut disajikan laporan realisasi belanja Desa Masaing Tahun 2023 dan 2022, khususnya yang dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem. Realisasi belanja Desa Masaing Tahun 2022 dan Tahun 2023 untuk penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem disajikan pada Tabel 1, yang menunjukkan bahwa untuk Tahun 2022 persentase belanja Desa Masaing untuk kegiatan

penanggulangan kemiskinan adalah sebesar 53,11 % dari total belanja desa sebesar Rp 1.409.924.398,- . Sedangkan pada Tahun 2023 persentase belanja desa untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah sebesar 41,76% dari total realisasi belanja desa sebesar Rp 1.474.276.923,-

Tabel 2. Realisasi Belanja Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan Desa Masaingi Tahun 2022 dan 2023

NO	KETERANGAN	JUMLAH REALISASI			
		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		Rp	%	Rp	%
	Total Belanja Desa				
1	Total Jumlah Realisasi Belanja	1.409.924.398,00	100	1.474.276.923,00	100
	Belanja untuk Penanggulangan Kemiskinan				
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	Sub Bidang Pendidikan				
	Penyelenggaraan PAUD/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	61.932.400,00	4,39	117.465.481,00	7,97
	Sub Bidang Kesehatan				
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, KIS, BUMIL, Lansia, Insentif)	112.500.000,00	7,98	132.000.000,00	8,95
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	-	-	-	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	Sub Bidang Pertanian				
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	127.071.048,00	9,01	178.423.260,00	12,10
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan				
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.463.750,00	0,95	20.408.020,00	1,38
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi				
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	9.075.000,00	0,64	-	-
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	-	-	14.865.080,00	1,01
4	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat				
	Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)	424.800.000,00	30,13	152.500.000,00	10,34
	Total Belanja Desa Untuk Penganggulangan Kemiskinan	748.842.198,00	53,11	615.661.841,00	41,76

Sumber: Laporan Realisasi APBDesa 2022 dan 2023

Realisasi penyaluran BLT di Desa Masaingi untuk Tahun 2022 sebesar 30,13% dari total jumlah belanja desa. Merujuk pada Perpres No. 104 Tahun 2021 yakni penyaluran penggunaan BLT paling sedikit 40%, maka penyaluran BLT di Desa Masaingi belum sesuai dengan ketentuan tersebut. Sedangkan realisasi belanja Desa Masaingi terkait program ketahanan pangan dan hewani adalah sebesar 9,01 persen dari total jumlah belanja desa Tahun 2022, yang menunjukkan bahwa realisasi tersebut belum sesuai dengan ketentuan Perpres No. 104 Tahun 2021 yang menetapkan alokasi belanja desa untuk program ketahanan pangan paling sedikit 20%.

Penyaluran BLT di Desa Masaingi Tahun 2023 adalah sebesar 10,34 % dari total realisasi belanja desa. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tersebut menyebutkan bahwa BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa, maka penyaluran BLT di Desa Masaingi untuk Tahun 2023 sudah sesuai. Sedangkan realisasi belanja Desa Masaingi terkait program ketahanan pangan dan hewani Tahun 2023 adalah sebesar 12,10 % menunjukkan bahwa realisasi tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa.

Realisasi belanja desa yang terkait langsung dengan kegiatan pengentasan kemiskinan selama 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Masaingi dalam mengurangi tingkat kemiskinan masih belum optimal. Hal ini nampak dalam laporan realisasi belanja desa yang menunjukkan bahwa

sebagian besar desa tetap memprioritaskan penggunaan dana desa tidak hanya untuk program yang terkait langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan tetapi juga untuk kegiatan lainnya, dimana hal ini tidak sejalan dengan target pemerintah untuk menghapus tingkat kemiskinan ekstrem pada Tahun 2024. Pada Tahun 2023 terjadinya penurunan persentase rata-rata realisasi belanja desa untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang cukup signifikan, yakni sebesar 32,27 % dari jumlah rata-rata tahun sebelumnya sebesar 47,13%, yang menunjukkan belum optimalnya upaya pemerintah desa untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. Dengan kondisi tingkat kemiskinan ekstrem yang masih terjadi, seharusnya pemerintah desa dapat memprioritaskan untuk meningkatkan porsi alokasi dana desa untuk belanja yang terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan

3.3. Peran Pemerintah Desa Masaingi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa peran Pemerintah Desa Masaingi dalam pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:

3.3.1 Peran Regulator Pemerintah Desa Masaingi

Sebagai pemegang kendali utama dalam regulasi kebijakan, Pemerintah Desa Masaingi diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, pemerintah desa perlu menyusun pedoman dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut. Pemerintah Desa Masaingi juga perlu menetapkan timeline program pengentasan kemiskinan guna memantau pencapaian dan keberhasilan dari program yang telah dirancang. Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan dapat memprioritaskan alokasi dana desa untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. (Gibran, Jaddang, & Ardiansyah, 2021).

Salah satu program yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Masaingi adalah menyusun data kemiskinan penduduk secara *by name by address*. Program ini melibatkan sensus mandiri oleh pemerintah desa untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi rumah beserta isinya, pendapatan dan pengeluaran, status kesehatan, status sosial, serta jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat (Manoppo & Laoh, 2022). Pendataan ini sangat penting karena data bersifat dinamis dan dapat berubah setiap waktu, sehingga data tahun sebelumnya mungkin berbeda signifikan dengan data terkini akibat berbagai faktor. Dengan pendataan yang lebih akurat, Pemerintah Desa Masaingi dapat memperoleh gambaran nyata tentang status warganya, apakah masih termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem atau sudah keluar dari kategori tersebut. Data ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah desa dan perlu dilaporkan kepada Kecamatan Sindue untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Donggala.

3.3.2 Peran Dinamisator Pemerintah Desa Masaingi

Sebagai penggerak utama, Pemerintah Desa Masaingi dituntut untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses kegiatan guna mendukung dan mempertahankan dinamika pembangunan desa. Peran ini diwujudkan melalui pelatihan, bimbingan, dan pengarahan kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam upaya bersama memajukan desa (Annisa & Seftarita, 2019). Dalam menjalankan peran sebagai dinamisator, pemerintah desa harus memiliki kemampuan memberikan arahan dan bimbingan yang efektif, serta mampu mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam berbagai program pemberdayaan (Laru & Suprojo, 2019). Upaya pemberdayaan ini bertujuan untuk memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat desa, sehingga dapat mendorong perubahan lingkungan hidup ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan, pemerintah desa perlu terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai institusi yang demokratis, pemerintah desa juga harus mampu membangkitkan dan menggerakkan seluruh elemen internal maupun eksternal dalam mendukung upaya pembangunan (Raintung, Sambiran, & Sumampow, 2021).

3.3.3 Peran Fasilitator Pemerintah Desa Masaingi

Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa berperan dalam mendampingi masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta memberikan dukungan pendanaan atau bantuan modal (Gani, Djafar, & Paramata, 2016). Peran ini sangat penting dalam mendukung pembangunan desa, di

mana fasilitas yang disediakan tidak hanya mencakup sarana, tetapi juga prasarana yang memadai. Selain itu, pemerintah desa perlu memberikan bimbingan teknis maupun nonteknis secara berkelanjutan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat mampu merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri sarana dan prasarana pemberdayaan, serta melaksanakan kegiatan pendukung lainnya secara mandiri (Vadeveloo & Singaravelloo, 2013). Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat Pemerintah Desa Masaingi mengenai pentingnya peran mereka dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Selain itu, masyarakat Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, diharapkan dapat keluar dari garis kemiskinan ekstrem (Rammohan & Tohari, 2023).

4. Kesimpulan

Desa Masaingi masih memiliki sejumlah warga yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan keterlibatan aktif pemerintah desa dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memaksimalkan penggunaan dana desa, terutama untuk kebutuhan prioritas yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Donggala, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memaksimalkan belanja dana desa, pemerintah desa juga dapat memberdayakan masyarakat melalui berbagai peran, seperti sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator (Aulia Adhiem, 2019). Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari adanya interaksi aktif antara pemerintah desa dan peserta, termasuk berbagi informasi mengenai langkah-langkah yang sudah diambil dan program yang direncanakan ke depan. Pemerintah desa diharapkan segera merealisasikan program yang telah dirancang agar Desa Masaingi dapat keluar dari kategori kemiskinan ekstrem (Kusmayadi, Weni, & Jatmikowati, 2024).

Sebagai rencana tindak lanjut, diperlukan penguatan mekanisme perencanaan anggaran dana desa di Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Pemanfaatan dana desa secara optimal untuk kegiatan yang langsung berkaitan dengan pengentasan kemiskinan ekstrem perlu dimulai dari perencanaan keuangan desa, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan memperkuat mekanisme perencanaan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, diharapkan langkah ini dapat mempercepat proses penghapusan kemiskinan ekstrem di desa tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan mekanisme perencanaan adalah dengan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa. Langkah ini selaras dengan program digitalisasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah, di mana desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan dapat berperan sebagai pelopor dalam penerapan teknologi digital tersebut (Indratno, Fardani, & Kuntoro, 2024).

Referensi

- Amofah, S., & Agyare, L. (2022a). Poverty alleviation approaches of development NGOs in Ghana: Application of the basic needs approach. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2063472. doi:<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2063472>
- Amofah, S., & Agyare, L. (2022b). Poverty alleviation approaches of development NGOs in Ghana: Application of the basic needs approach. *Cogent Social Sciences*, 8, 2063472. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/23311886.2022.2063472>
- Anindita, G. N. K. (2024). Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan Di 25 Provinsi Wilayah Prioritas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. *Media Ekonomi*, 32(1), 61-76. doi:<https://doi.org/10.25105/kdwgh758>
- Annisa, S., & Sefarita, C. (2019). Pengaruh Dana Desa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 356-363.
- Aulia Adhiem, M. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan. *Majalah Ilmiah Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara Lt. 2*.
- Castañeda, A., Doan, D., Newhouse, D., Nguyen, M. C., Uematsu, H., & Azevedo, J. P. (2018). A new profile of the global poor. *World Development*, 101, 250-267. doi:<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.08.002>

- Dharma, F., Agustina, Y., & Windah, A. (2021). Penerapan Manajemen Keuangan dan Digital Marketing pada Pelaku Usaha Rengginang di Desa Kunjir. doi:<https://doi.org/10.35912/jnm.v1i1.620>
- Gani, R., Djafar, L., & Paramata, S. H. (2016). Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 5(1), 60-68. doi:<https://dx.doi.org/10.31314/pjia.5.1.60-68.2016>
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(3), 230-249.
- Hardana, A. (2023). Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 7-19.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on poverty+ inequality*: World Bank Publications.
- Hermanto. (2024). PENGENTASAN KEMISKINAN DI PERDESAAN: PENGEMBANGAN SDM.
- Indratno, I., Fardani, I., & Kuntoro, S. H. (2024). Design of village e-budgeting information systems. doi:<https://doi.org/10.35912/jgas.v4i2.2296>
- Khomsin, M. A. (2023). Analisis Yuridis Perlu Tidaknya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa: Studi Kasus di Kabupaten Kudus. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 3(1), 31-39. doi:<https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i1.2331>
- Kusmayadi, R. C. R., Weni, I. M., & Jatmikowati, S. H. (2024). Community Participation in Village Development: Social Reality Study in the Village Development Process in Wandanpuro Village, Bululawang District, Malang Regency. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS) ISSN: 2582-6220, DOI: 10.47505/IJRSS*, 5(6), 124-145. doi:<https://doi.org/10.47505/IJRSS.2024.6.10>
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 367-371. doi:<https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen*, 4(1), 25-39.
- Naltaru, M. (2014). Perencanaan sistem pengelolaan sampah di kawasan wisata Bukit Kelam Kabupaten Sintang. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.26418/jtllb.v2i1.6623>
- Putri, L. A., Wulan, M. N., Fihartini, Y., Ambarwati, D. A. S., & Pandjaitan, D. R. (2022). Pendampingan Pengembangan Pemasaran Digital Pada BUMDes Artha Jaya, Desa Yogyakarta Selatan. doi:<https://doi.org/10.35912/jnm.v2i1.1442>
- Putri, W. H., Kresnanto, N. C., Raharti, R., & Andari, E. (2024). Inkubasi Bisnis Lokabadra sebagai Embrio Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 475-484. doi:<https://doi.org/10.35912/yumary.v4i4.2742>
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*, 1(2).
- Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: Evidence from Indonesia's Village fund program. *PloS one*, 18(6), e0283041. doi:<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041>
- Sinarwati, N. K., Putra, I. K. E., & Rona, I. W. (2023). The Role of Village Government in Achieving Village Without Poverty. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 273-280.
- Vadeveloo, T., & Singaravelloo, K. (2013). Local government and community development. *International Journal of Business, Economics and Law*, 2(2), 54-59.
- Wahyudi, R., Fauzi, Y., & Rizal, J. (2023). Analisis kemiskinan ekstrem Provinsi Bengkulu menggunakan metode geographically weighted regression (GWR) dengan pembobot adaptive gaussian kernel dan adaptive bi-square. *Journal of Mathematics UNP* <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/mat>, 8(2), 134-149.